

## TATA KELOLA PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Pandu Pamungkas<sup>1(a)</sup>, Aji Pangestu<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya

<sup>a)</sup>pandupamungkas@fisip.unsri.ac.id, <sup>b)</sup>ajipangestu@fisip.unsri.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

06-02-2026

Diterbitkan Online:

31-03-2026

#### Kata Kunci:

Pengelolaan Sampah, Pelayanan Publik, Dinas Lingkungan Hidup

#### Keywords:

Waste Management, Public Services, Department of Environmental Affairs

#### Corresponding Author:

pandupamungkas@fisip.unsri.ac.id

### ABSTRAK

Pelayanan pengelolaan sampah merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat perkotaan. Kota Bandar Lampung sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi Provinsi Lampung menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya timbulan sampah seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah serta mengidentifikasi tantangan dan inovasi yang dikembangkan dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, melalui kajian terhadap dokumen kebijakan, peraturan daerah, laporan kinerja DLH, serta data sekunder terkait pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun capaian pengelolaan sampah secara operasional mengalami peningkatan, pertumbuhan volume sampah tahunan belum sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas sarana prasarana, pendanaan, dan efektivitas sistem pengelolaan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumber serta ketergantungan pada pola pengelolaan konvensional masih menjadi kendala utama. DLH Kota Bandar Lampung telah mengembangkan berbagai upaya inovatif, seperti program Postalinga, penguatan bank sampah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Inovasi tersebut memberikan kontribusi positif dalam upaya pengurangan timbulan sampah, khususnya sampah organik, namun masih memerlukan perluasan cakupan dan konsistensi implementasi. Dengan penguatan tata kelola, pembiayaan yang berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran publik, Kota Bandar Lampung memiliki potensi besar untuk mewujudkan sistem pelayanan pengelolaan sampah yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

### ABSTRACT

Waste management services are a form of public service that plays a strategic role in maintaining the quality of the environment and the health of urban communities. Bandar Lampung City, as the centre of government and economic activity in Lampung Province, faces serious challenges due to the increase in waste generation in line with population growth, urbanisation, and changes in community consumption patterns. This study aims to analyse the role of the Bandar Lampung City Environment Agency (DLH) in the implementation of waste management services and to identify the challenges and innovations developed in supporting sustainable waste management. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature review method, through a review of policy documents, local regulations, DLH performance reports, and secondary data related to waste management. The results of the study show that although operational waste management achievements have

*improved, the annual growth in waste volume has not been fully offset by infrastructure capacity, funding, and the effectiveness of the management system. Low community participation in waste sorting at source and dependence on conventional management patterns remain major obstacles. DLH has developed various innovative efforts, such as the Postalinga programme, strengthening waste banks, increasing human resource capacity, and cross-sector collaboration with the government, the private sector, and the community. These innovations have made a positive contribution to waste reduction efforts, particularly organic waste, but still require expansion in scope and consistency in implementation. With strengthened governance, sustainable financing, and increased public awareness, Bandar Lampung City has great potential to realise an efficient, environmentally friendly, and sustainable waste management service system.*

**DOI:**

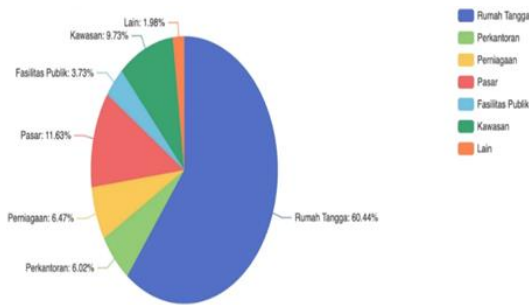
<https://doi.org/10.24036/publicness.v5i1.360>

**PENDAHULUAN**

Pelayanan publik adalah salah satu tugas utama pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, definisi pelayanan publik adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau layanan administratif sesuai aturan. Pada dasarnya, kualitas pelayanan umum harus terus ditingkatkan agar sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pengguna jasa (Saefullah, 2008). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan desentralisasi mengindikasikan penyerahan sebagian kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah, bertujuan untuk menjalankan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab serta berkaitan dengan kepentingan daerah tersebut (otonomi). Urusan yang mencakup tanggung jawab dan kepentingan daerah terdiri dari urusan umum dan pemerintahan, penyelesaian fasilitas layanan publik, serta urusan sosial, budaya, agama, dan komunitas (Elmi, 2002). Pelayanan publik tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan, tetapi juga melingkupi aspek-aspek fundamental dari kehidupan sehari-hari, seperti kebersihan lingkungan dan pengelolaan limbah. Salah satu jenis layanan publik yang sangat penting namun sering kali terabaikan adalah pengelolaan sampah atau layanan persampahan di perkotaan.

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang semakin kompleks seiring

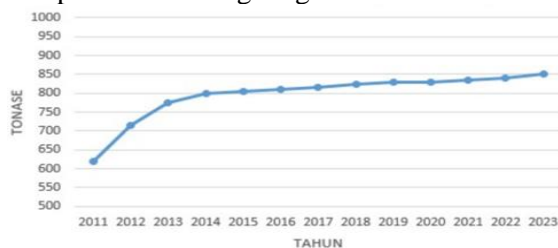
dengan meningkatnya laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan. Kota sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya menghasilkan volume sampah yang tinggi setiap harinya. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) rata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai lebih dari 60 juta ton per tahun, di mana sebagian besar berasal dari kawasan perkotaan (KLKH, 2023). Kondisi ini menuntut adanya sistem pelayanan pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat maupun lingkungan. Aktivitas sehari-hari rumah tangga menjadi salah satu penyebab terbesar limbah di Indonesia. Menurut informasi dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK pada tahun 2023, sekitar 60,44% dari total limbah dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, sementara aktivitas di pasar berkontribusi sebesar 11,63%. Sampah organik dari rumah tangga, khususnya sisa makanan, muncul sebagai penyebab utama dengan proporsi sekitar 40-45% dari keseluruhan komposisi limbah, sedangkan sampah plastik menyumbang sekitar 15% (KLKH, 2023).



**Gambar 1. Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah**  
Sumber: SIPSN, 2023

Diagram di atas menunjukkan sumber sampah terbanyak berasal dari rumah tangga. Sampah rumah tangga merupakan permasalahan klasik yang selalu hadir di setiap daerah perkotaan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, dan peningkatan aktivitas ekonomi, volume sampah yang dihasilkan masyarakat semakin meningkat. Pengelolaan pelayanan sampah perkotaan menjadi isu sentral bagi pemerintahan daerah karena implikasinya yang luas terhadap kesehatan lingkungan, kualitas hidup warga, dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung, mengalami tekanan peningkatan volume sampah seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup. Pesatnya laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di wilayah Bandar Lampung secara langsung berkorelasi dengan peningkatan volume timbulan sampah harian. Fenomena ini telah menjadikan pengelolaan sampah perkotaan sebagai salah satu isu lingkungan dan manajemen publik yang paling kompleks dan mendesak di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan data nasional, komposisi sampah didominasi oleh sampah organik, namun persentase sampah anorganik, terutama plastik, terus meningkat, menimbulkan masalah serius terkait daya urai dan pencemaran lingkungan.



**Gambar 2. Rata-rata Volume Sampah (Ton/Hari) Kota Bandar Lampung**  
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2024

Grafik di atas menunjukkan produksi sampah menunjukkan kenaikan seiring waktu, mencapai puncak tertinggi di tahun 2023 dengan total 850 ton setiap harinya. Pengelolaan sampah menunjukkan perkembangan yang signifikan, mencerminkan dedikasi Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani limbah secara efisien. Sampah yang dikelola dalam setahun mengalami pertumbuhan yang stabil, menandakan komitmen berkelanjutan dalam mengatasi isu sampah. Peningkatan produksi sampah menuntut pelayanan publik yang tidak hanya mampu mengangkut dan membuang sampah, tetapi juga mengintegrasikan prinsip pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan. Laporan ini menyajikan wawasan yang komprehensif mengenai pola sampah di Kota Bandar Lampung, dan diharapkan dapat menjadi dasar untuk perencanaan yang cermat dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Melalui berbagai upaya dan kerjasama, diharapkan kota ini bisa terus mengurangi efek buruk sampah sambil meningkatkan kesadaran ekologi di kalangan penduduknya.

**Tabel 1. Produksi Sampah, Jumlah Sampah yang Ditangani, dan Sampah yang Ditangani dalam Setahun Kota Bandar Lampung**

Tahun	Perkiraan Produksi Sampah (Ton/hari)	Jumlah Sampah yang Ditangani (Ton/hari)	Sampah yang Ditangani dalam Setahun (Ton/thn)
2019	830 ton	795 ton	286.200 ton
2020	830 ton	800 ton	288.000 ton
2021	835 ton	810 ton	291.600 ton
2022	840 ton	810 ton	291.600 ton
2023	850 ton	845 ton	304.200 ton

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2024

DLH Kota Bandar Lampung didirikan sebagai entitas organisasi teknis khusus, memainkan peran penting dalam menjalankan tingkat otonomi dalam domain pengelolaan lingkungan, sehingga memastikan bahwa proses-proses ini dilakukan dengan cara yang sangat efisien dan efektif, sementara juga bertujuan untuk memfasilitasi upaya pembangunan yang memprioritaskan prinsip-

prinsip penting pelestarian lingkungan bersama dengan berkelanjutan praktik pengembangan. Pembentukan DLH Kota Bandar Lampung diformalkan melalui pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016, yang secara khusus berkaitan dengan penciptaan dan penataan organisasi perangkat daerah dalam kerangka tata kelola kota. Selain itu, tanggung jawab, fungsi, dan protokol operasional DLH ini telah dijelaskan lebih lanjut dan diatur melalui Peraturan Walikota Nomor 35 tahun 2020, yang memberikan garis besar komprehensif prosedur operasionalnya. Melalui langkah-langkah peraturan ini, kota ini bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan yang memiliki prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis dalam semua aspek pengembangan perkotaan dan praktik pengelolaan persampahan (Renstra DLH Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026).

**Tabel 2. Data Umum Pelayanan Retribusi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung**

No.	Jenis	Jumlah
1.	Rumah Tangga	68 Objek
2.	Pusat Perbelanjaan	58 Objek
3.	Fasilitas Umum (Rumah Sakit, Lab, Apotek, Praktik Dokter, Pendidikan)	200 Objek
4.	Hotel	70 Objek
5.	Rumah Toko (Ruko) / Toko	1328 Objek
6.	Perkantoran	358 Objek
7.	Gedung Pertemuan	3 Objek
8.	Asrama / Kost	7 Objek
9.	Bengkel	55 Objek
10.	Industri	6 Objek
11.	Pergudangan	79 Objek
12.	Rumah Makan / Restoran	266 Objek
13.	Sarana Olahraga dan tempat Hiburan	13 Objek

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2024

Pelayanan persampahan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan publik yang berfungsi menjaga kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan kota. Layanan ini tidak hanya berfokus pada kegiatan pengumpulan dan pembuangan sampah, tetapi juga mencakup pengelolaan yang berkelanjutan, seperti pemilahan, daur ulang, pengomposan, hingga pemrosesan akhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (Suharto, 2020).

Kualitas pelayanan persampahan sangat bergantung pada tata kelola pemerintahan daerah, ketersediaan anggaran, partisipasi masyarakat, serta penerapan teknologi pengelolaan sampah yang efisien dan ramah lingkungan. Kebijakan nasional dan peraturan teknis memberikan kerangka bagi pemerintah daerah untuk menyusun layanan pengelolaan sampah, namun penerapan di tingkat kota seringkali menghadapi tantangan lokal berupa keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan kapasitas institusional (Suharto, 2020).

Pelayanan publik dapat dikonseptualisasikan sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi persyaratan pengguna warga negara. Target demografis dalam konteks ini mencakup warga negara yang mencari berbagai layanan publik, termasuk namun tidak terbatas pada penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, dan layanan penting lainnya, seperti pengelolaan sampah. (Dwiyanto, 2006).

Pelayanan sampah memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang bersih, sehat, dan berdaya guna. Pelayanan ini mencakup serangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir sampah. Pelayanan sampah yang efektif dan efisien merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. Namun, kenyataannya, sistem pelayanan sampah perkotaan di banyak daerah seringkali masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana pengangkutan yang tidak sebanding dengan volume sampah, rendahnya cakupan layanan yang merata di seluruh wilayah, hingga masih dominannya paradigma lama 'kumpul-angkut-buang' yang mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kelebihan kapasitas TPA dan potensi bencana lingkungan menjadi ancaman nyata yang menuntut perubahan fundamental dalam pendekatan pengelolaan sampah. Pemerintah daerah berperan sebagai penyelenggara utama, sementara masyarakat dan sektor swasta menjadi mitra yang berperan aktif dalam mendukung kebersihan kota. Pelayanan persampahan yang efektif dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menumbuhkan citra positif pemerintah daerah sebagai pelayanan masyarakat yang responsif dan

berorientasi pada keberlanjutan (Suharto, 2020).

Kajian literatur mengenai pengelolaan sampah di perkotaan menegaskan perlunya pendekatan terpadu yang mencakup aspek teknis, kelembagaan, sosial, dan ekonomi. Dokumen global dan nasional menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya dan transisi ke ekonomi sirkular sebagai strategi mengurangi beban tempat pembuangan akhir serta menciptakan nilai melalui pemulihan material. Namun, transformasi ini membutuhkan tata kelola yang adaptif, pembiayaan yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta. Di tingkat daerah, inovasi seperti bank sampah, skema iuran berbasis volume, dan kemitraan pengolahan telah dicoba di berbagai kota dengan hasil beragam, tergantung pada konteks lokal dan komitmen kebijakan. Bandar Lampung memiliki peluang dan tantangan khas yang layak dianalisis agar rekomendasi kebijakan yang muncul relevan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Penelitian studi kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi dengan cara memanfaatkan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Metode ini berguna untuk mendukung penelitian dengan referensi yang valid dan relevan (Zed, 2004). Kajian dokumen dilakukan terhadap peraturan daerah, rencana teknis pengelolaan sampah, laporan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, serta dokumen kebijakan nasional yang relevan. Disertai dengan menggunakan analisis data sekunder laporan tentang pengelolaan sampah digunakan untuk mengontekstualisasikan temuan lokal dalam tren yang lebih luas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi hubungan antara elemen kelembagaan, teknis, dan sosial yang membentuk efektivitas pelayanan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahapan yang sistematis. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan kinerja, peraturan daerah, serta literatur ilmiah dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian.

Selanjutnya, dilakukan reduksi data dengan memilih informasi yang relevan dengan aspek kelembagaan, operasional pelayanan, sarana prasarana, pendanaan, partisipasi masyarakat, dan inovasi pengelolaan sampah. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara deskriptif-naratif untuk menggambarkan kondisi pelayanan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Tahap akhir adalah interpretasi data dengan mengaitkan temuan empiris pada konsep pelayanan publik, pengelolaan sampah berkelanjutan, dan prinsip ekonomi sirkular, yang kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebuah negara dibangun oleh komunitas yang berada di suatu daerah dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama para anggotanya dalam kerangka kolektivitas. Dalam harapan setiap individu dalam masyarakat ini, negara yang mereka dirikan diharapkan mampu menjalankan perannya dalam menyediakan kebutuhan hidup yang berkaitan dengan interaksi mereka dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam konteks sehari-hari, kebutuhan kolektif tersebut sering kita sebut sebagai "kebutuhan publik" (Abrur, 2013). Penerapan hukum pemerintahan daerah yang terkait dengan urusan lokal dilaksanakan dengan otonomi yang seluas-luasnya. Dengan otonomi yang diberikan secara maksimal, setiap daerah akan diberi keleluasaan dalam mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri berdasarkan potensi dan kapasitas setempat, sehingga daerah dapat lebih cepat mencapai tujuan utama mereka, yaitu peningkatan pelayanan kepada warga dan kesejahteraan masyarakat setempat (Indonesia, 2002).

Struktur pelayanan pengelolaan sampah di Bandar Lampung masih berpijak pada model layanan publik konvensional. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung bertindak sebagai otoritas utama yang merancang kebijakan, mengorganisasi pengangkutan, dan mengawasi operasional. Pada tingkatan operasional, pengumpulan sampah dilakukan melalui armada milik pemerintah kota yang menjangkau kawasan permukiman sesuai rute dan jadwal. Untuk area komersial dan pasar tradisional, terdapat kombinasi layanan pemerintah dan pengelolaan mandiri oleh pelaku usaha. Sementara itu, transfer station dan TPA menjadi titik akhir dari

rantai layanan, dengan kapasitas yang terbatas untuk menerima volume yang terus meningkat.

Salah satu temuan penting adalah rendahnya praktik pemilahan sampah pada sumber. Warga umumnya mencampur sampah organik dan non-organik, sehingga potensi pemulihan material berkurang. Keberadaan bank sampah di beberapa Kelurahan menunjukkan inisiatif masyarakat untuk memisahkan dan mengumpulkan material yang dapat dijual, namun cakupan dan skala bank sampah masih terbatas. DLH Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa program edukasi publik sudah dilakukan, namun perubahan perilaku masyarakat memerlukan waktu dan pendekatan yang lebih intensif serta berkelanjutan. Hambatan sosio-kultural, kebiasaan lama, serta persepsi bahwa pemilahan adalah tugas pemerintah saja menjadi faktor yang menghambat adopsi pemilahan sampah.



**Gambar 3. Grafik Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung Tahun 2024**

Sumber: SIPSAN, 2024

Dalam diagram tersebut, terlihat seberapa besar capaian kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan DLH Kota Bandar Lampung selama tahun 2024. DLH Kota Bandar Lampung berperan vital dalam pengelolaan lingkungan di daerahnya. DLH Kota Bandar Lampung telah memulai sejumlah program strategis guna meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. DLH Kota Bandar Lampung bertekad untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Berikut adalah beberapa aspek terkait pengelolaan dan pengadaan yang dilakukan oleh DLH Kota Bandar Lampung:

### Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung secara aktif terlibat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, pendukung lingkungan, dan individu yang menunjukkan kepedulian terhadap pengelolaan limbah dalam konteks pengelolaan lingkungan.

Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Kota Bandar Lampung dihadapkan dengan tantangan yang timbul dari perubahan iklim dan meningkatnya volume limbah, yang mengharuskan pembentukan upaya kolaborasi antara badan-badan pemerintah, masyarakat umum, dan sektor swasta. Inisiatif ini mencakup kegiatan seperti penghijauan, restorasi sungai, dan kemajuan praktik pengelolaan limbah. Melalui inisiatif ini, DLH Kota Bandar Lampung berdedikasi untuk membina lingkungan yang murni, sehat, dan berkelanjutan bagi semua penduduk. Sejalan dengan Rencana Kerja (Renja) Kota Bandar Lampung untuk tahun 2024, digambarkan sebuah program untuk peningkatan pendidikan, pelatihan, dan kesadaran lingkungan, yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tahun 2025. Program ini akan mencakup beragam kegiatan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan kompetensi masyarakat dan pejabat lokal dalam domain pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Berdasarkan jumlah SDM aparatur yang ada di DLH Kota Bandar Lampung terlihat pada tabel sebagaimana di bawah ini :

**Tabel 3. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan**

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1			
2	Sekretariat		1	3	65
3	Bidang Tata Lingkungan		1	3	18
4	Bidang Pengelolaan Sampah		1	3	190
5	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		1	3	78
6	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		1	3	14
7	UPT Laboratorium			1	7
8	UPT Pengelolaan Sampah Telukbetung Barat			2	8

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf
9	UPT Pengelolaan Sampah Telukbetung Timur			2	11
10	UPT Pengelolaan Sampah Telukbetung Selatan			2	53
11	UPT Pengelolaan Sampah Telukbetung Utara			2	35
12	UPT Pengelolaan Sampah Bumi Waras			2	28
13	UPT Pengelolaan Sampah Tanjungkarang Pusat			2	149
14	UPT Pengelolaan Sampah Tanjungkarang Timur			2	25
15	UPT Pengelolaan Sampah Tanjungkarang Barat			2	45
16	UPT Pengelolaan Sampah Panjang			2	40
17	UPT Pengelolaan Sampah Kedamaian			2	15
18	UPT Pengelolaan Sampah Enggal			2	42
19	UPT Pengelolaan Sampah Kemiling			2	27
20	UPT Pengelolaan Sampah Langkapura			2	10
21	UPT Pengelolaan Sampah Kedaton			2	41
22	UPT Pengelolaan Sampah Rajabasa			2	21
23	UPT Pengelolaan Sampah Tanjung Seneng			2	13
24	UPT Pengelolaan Sampah Labuhan Ratu			2	25

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf
25	UPT Pengelolaan Sampah Sukarame			2	18
26	UPT Pengelolaan Sampah Sukabumi			2	15
27	UPT Pengelolaan Sampah Way Halim			2	31
28	UPT Pengelolaan Sampah TPA Bakung			2	14

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2024

### Penguatan Fungsi Bank Sampah

Dalam upaya memperbaiki manajemen limbah di komunitas, DLH Kota Bandar Lampung melaksanakan kegiatan pendampingan serta pelatihan untuk pengelola bank sampah. Inisiatif ini diharapkan mampu memaksimalkan pengurangan limbah langsung dari sumbernya. DLH Kota Bandar Lampung juga menjalankan program edukasi, pelatihan, dan penyuluhan tentang lingkungan bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam merawat dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Sebagai contoh, pada 4 Oktober 2024, DLH Kota Bandar Lampung mengadakan sosialisasi terkait pengelolaan limbah di SMA Santo Thomas 1, yang berada di Jalan S. Parman, Bandar Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya pengelolaan limbah yang efektif dan benar. Selain itu, pada 2 Desember 2024, DLH Kota Bandar Lampung melangsungkan audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dari Sumatera Utara untuk membangun kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan lingkungan. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan.

### Kolaborasi dengan Institusi lain dalam Pengembangan Kinerja

DLH Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan PT PLN dalam mengolah limbah menjadi Bahan Bakar Jumpatan Padat (BBJP). Usaha ini merupakan langkah untuk memproses limbah menjadi sumber energi yang ramah

lingkungan. Di samping itu, program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah sekaligus menyediakan energi alternatif yang tidak merusak lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Program Kampung Iklim melalui Bidang Tata Lingkungan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi dampak perubahan iklim di tingkat lokal. Selain itu fasilitas pengelolaan sampah yang diperbaharui setiap tahunnya bermacam-macam, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. Fasilitas Pengelolaan Sampah**

Tong/Tempat Sampah	Mobil Pick Up
Container Sampah	Dump Truck
Gerobak	Truck Armroll
Motor Roda Tiga	Truck Tangki
Motor Roda Dua	Alat Berat ( <i>Excavator</i> )

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2024*

DLH Kota Bandar Lampung juga aktif menjalankan kolaborasi dengan berbagai entitas guna meningkatkan mutu lingkungan di daerah tersebut. Kolaborasi ini meliputi beragam sektor, seperti pemerintah daerah, swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas. DLH Kota Bandar Lampung juga bekerja sama dengan berbagai organisasi non-pemerintah untuk kegiatan edukasi lingkungan dan penghijauan. DLH Kota Bandar Lampung mengidentifikasi lokasi yang membutuhkan kerjasama, mencakup pengelolaan limbah, pengendalian polusi, serta program penghijauan. DLH Kota Bandar Lampung mencari mitra yang memiliki keahlian dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. DLH Kota Bandar Lampung dan mitra mereka menyusun kesepakatan kerjasama yang meliputi tujuan, lingkup, tanggung jawab, serta metode evaluasi.

Pelaksanaan kerjasama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, dengan adanya pemantauan dan evaluasi yang rutin. Setelah eksekusi, evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kerjasama dan menyusun laporan yang menjadi bahan perbaikan di masa depan. Kerjasama ini memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, memperhatikan keterbatasan anggaran dan sumber daya yang dimiliki oleh DLH Kota

Bandar Lampung. Melalui kolaborasi, DLH Kota Bandar Lampung bisa mengakses teknologi dan pendekatan baru dalam pengelolaan lingkungan. Kerjasama yang berhasil akan meningkatkan mutu lingkungan hidup di Bandar Lampung, menjadikannya lebih bersih, hijau, dan sehat.

#### **Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Barang Jasa lainnya**

DLH Kota Bandar Lampung di tahun 2024 telah mengalokasikan dana sekitar Rp.20,8 miliar untuk membeli bahan bakar minyak. Dana ini diperuntukkan bagi mendukung aktivitas kendaraan dan peralatan yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan, seperti pengangkutan limbah dan kegiatan operasional lainnya. Saat memulai perencanaan, DLH Kota Bandar Lampung membuat Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merinci kebutuhan barang dan jasa untuk tahun anggaran yang akan datang. Setelah RUP selesai, Dinas mengumumkan paket pengadaan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandar Lampung agar penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat dapat ikut serta.

Hal ini menunjukkan bahwa model pengelolaan sampah masih didominasi pendekatan linear berbasis kumpul–angkut–buang dengan ketergantungan tinggi pada energi fosil. Dari perspektif ekonomi sirkular, kondisi ini mencerminkan rendahnya efisiensi sumber daya karena sebagian besar anggaran terserap pada aktivitas hilir yang tidak menghasilkan nilai tambah material maupun energi. Ketergantungan terhadap BBM juga menimbulkan risiko keberlanjutan fiskal akibat fluktuasi harga energi dan membatasi ruang investasi pada upaya pengurangan sampah dari sumber, pemrosesan lokal, serta pemulihan nilai ekonomi sampah. Oleh karena itu, pergeseran alokasi anggaran menuju penguatan pemilahan, pengolahan berbasis komunitas, dan pemanfaatan energi alternatif dari limbah menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sampah sesuai prinsip ekonomi sirkular.

Selain bahan bakar minyak, DLH Kota Bandar Lampung melakukan berbagai jenis pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Kota Bandar Lampung. Para pihak yang ingin mendapatkan informasi mengenai paket pengadaan, termasuk kategori pengadaan dan anggaran yang dialokasikan, dapat mengunjungi portal resmi LPSE Kota Bandar

Lampung. DLH Kota Bandar Lampung secara teratur melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung berbagai program pengelolaan lingkungan hidup di daerah tersebut. Proses pengadaan ini dilakukan dengan menggunakan sistem e-procurement yang menjamin transparansi dan akuntabilitas, seperti yang tercatat dalam LPSE Kota Bandar Lampung. Salah satu contoh pengadaan yang terdaftar adalah pengadaan barang dengan batas anggaran Rp.57.000.000,-. Setelah tahap penawaran, evaluasi dilakukan terhadap semua penawaran yang masuk untuk menentukan pemenang yang memenuhi kriteria dan harga yang sesuai.

Pemenang dari tender akan ditentukan dan dilaksanakan penandatanganan kontrak untuk menjalankan pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pengadaan yang dilakukan oleh DLH Kota Bandar Lampung berjalan dengan transparan lewat sistem e-procurement, yang memberikan kesempatan kepada publik dan pihak terkait untuk memonitor dan mengakses informasi mengenai pengadaan yang berlangsung. Tujuan dari ini adalah untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan secara efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk informasi lebih lengkap mengenai pengadaan yang dilakukan oleh DLH Kota Bandar Lampung.

**Tabel 5. Sarana dan Prasarana**

No.	Nama Barang/Jumlah		Keadaan Barang		
	Jenis Barang	Barang	B	KB	RB
1.	Mobil Minibus	1	1	-	-
2.	Mobil Minibus Laboratorium	1	-	1	-
3.	Pick up	34	31	1	2
4.	Dump Truck	83	63	6	14
5.	Truck Arm roll	37	29	2	6
6.	Buldozer	2	0	0	1
7.	Excavator	3	2	1	-
8.	Sepeda Motor Roda 2	15	12	1	-
9.	Motor Roda 3	48	35	-	13
10.	Gerobak Sampah	489	420	-	69
11.	Kontainer Sampah	196	108	5	83
12.	Mesin Bor	8	6	2	-
13.	Mesin gergaji	5	4	1	-
14.	Genset	4	2	2	-
15.	Water meter	55	55	-	-
16.	Mesin Tik	33	12	10	11
17.	Mesin Absen	4	4	-	-

No.	Nama Barang/Jumlah		Keadaan Barang		
	Jenis Barang	Barang	B	KB	RB
18.	Mesin kakulator	3	-	3	-
19.	Tong Sampah	258	123	105	30
20.	Mesin potong rumput	63	63	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2024

### **Pembuatan Inovasi Solusi dalam Rangka Pengurangan Jumlah Sampah**

Dalam usaha untuk menciptakan ekosistem yang lebih indah dan berkelanjutan, DLH Kota Bandar Lampung telah mengembangkan inovasi terbaru yang dikenal dengan nama Kompos Menciptakan Lingkungan Asri (Postalinga). Postalinga bukan sekadar teknik pengelolaan sampah, melainkan pendekatan kreatif yang mengubah limbah menjadi sumber daya yang bermanfaat, yakni pupuk kompos. Inovasi ini lahir dari kesadaran akan perlunya mengurangi volume limbah dan menciptakan ekosistem yang lebih hijau. Postalinga menjadi solusi yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah, tetapi juga membawa dampak positif bagi lingkungan di sekitar. Kegiatan Postalinga mencakup pengumpulan limbah organik yang kemudian diolah secara efisien menjadi pupuk kompos. Metode ini berkontribusi untuk mengurangi dampak negatif dari penumpukan limbah di Kota Bandar Lampung, sekaligus memberikan keuntungan secara finansial dan ekologis. Pupuk kompos yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali untuk meningkatkan kesuburan lahan, menciptakan siklus yang berkelanjutan, serta meminimalkan ketergantungan pada pupuk kimia.

Dengan adanya Postalinga, DLH Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa inovasi dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan lingkungan. Tindakan seperti ini tidak hanya merubah sampah menjadi sumber daya, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam menjaga kebersihan dan melestarikan alam. Melalui Postalinga, Kota Bandar Lampung berkomitmen menuju pengelolaan sampah yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Diantisipasi, inovasi ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kota-kota lain dalam mengeksplorasi potensi positif dari limbah dan mewujudkan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

## Implementasi Program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

DLH Kota Bandar Lampung menempati peran penting dalam pelaksanaan efektif Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini dirumuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bertujuan untuk mengevaluasi dan memberi insentif kepada perusahaan untuk meningkatkan praktik pengelolaan lingkungan mereka. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menginspirasi perusahaan untuk mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku dan untuk berkomitmen pada praktik manajemen berkelanjutan. Program ini melibatkan penyediaan layanan pendampingan dan evaluasi untuk bisnis di wilayah tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang ditetapkan. Selain itu, juga menyebarkan sumber daya pendidikan dan informasi kepada publik mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan yang efektif.

Misalnya, pada tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Sumatera Utara akan memberikan panduan kepada perusahaan-perusahaan yang dikategorikan sebagai klasifikasi hitam dan merah di bawah klasifikasi Proper, dengan tujuan memajukan status mereka ke kategori biru, hijau, atau emas. Perusahaan yang gagal menunjukkan kemajuan dapat menghadapi hukuman administratif, yang dapat mencakup pencabutan lisensi operasional. Melalui pelaksanaan program Proper ini, diharapkan bisnis di Kota Bandar Lampung akan meningkatkan kinerja lingkungannya, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan secara keseluruhan.



**Gambar 4. Logo Program Proper**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2024

## PENUTUP

Pelayanan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung menunjukkan perkembangan yang positif dari sisi operasional, namun masih menghadapi tantangan mendasar dalam hal efisiensi, pendanaan, dan partisipasi masyarakat. Peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan setiap tahun tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan dan infrastruktur yang tersedia. Program-program inovatif seperti *Postalinga* telah menjadi langkah progresif dalam upaya pengurangan sampah organik, tetapi penerapan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga masih rendah. Ketergantungan terhadap anggaran daerah (APBD) tanpa adanya diversifikasi sumber pembiayaan menghambat keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang bersifat integratif dan kolaboratif. Pemerintah daerah perlu memperkuat peraturan lokal, meningkatkan transparansi pembiayaan, dan memperluas kerja sama dengan sektor swasta serta masyarakat. Edukasi publik yang berkesinambungan juga berperan penting dalam membentuk perilaku sadar lingkungan. Implementasi prinsip ekonomi sirkular, seperti daur ulang dan pemanfaatan kembali material, dapat meningkatkan nilai ekonomi dari sampah serta mengurangi tekanan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, Bandar Lampung berpotensi menjadi kota yang bersih, hijau, dan berdaya saing lingkungan di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrur, Daimol. (2013). *Buku Ajar Mata Kuliah Pelayanan Publik*. Pasuruan; Universitas Yudharta
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. *Laporan Tahunan Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: DLH Kota Bandar Lampung
- Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta; Universitas Gadjah Mada

- Elmi, Bachrul. (2002). *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Kofi, A., & Martha, R. (2016). Informal Waste Sector Integration: Lessons from Southeast Asian Cities. *International Journal of Waste Resources*, 6 (4).
- Kresna, T. (2015). Model Kemitraan Publik-Swasta dalam Pengelolaan Sampah di Kota-Kota Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 7.(3)
- Mulyani, D. (2018). Kebijakan Pembiayaan Layanan Sampah Perkotaan: Pendekatan Inovatif. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12 (2)
- Saefullah, H. A. D., (2008). *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Era Desentralisasi*. Bandung: AIPI dan PK2W Lemlit Unpad
- Suharto, B., & Nurhayati, E. (2020). Teknologi Pengolahan Sampah Organik Skala Komunitas di Perkotaan. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 9 (1)
- UN-Habitat. (2010) *Solid Waste Management in the World's Cities: Water and Sanitation in the World's Cities*. London: Earthscan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- World Bank. (2018) *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. Washington, DC: World Bank
- Zed, M., 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia